

## Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi

Gili Argenti, S.IP, M.Si & Maulana Rifai, S.IP, M.A

### Abstrak

“Paradigma Islam-Politik terhadap negara terbagi ke dalam tiga paradigma : Islam formalis, Islam liberal dan Islam subtansi. Ketiga paradigma ini mempengaruhi relasi Islam politik dengan negara baik selama Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Lama Islam formalis menjadi arus utama ideologi partai politik Islam, sedangkan masa Orde Baru Islam subtansi berhasil menjangkit relasipolitik dengan negara. Era reformasi terjadi dialektika diantara tiga paradigma Islam politik”

### PENDAHULUAN

Perjalanan politik Indonesia dari masa ke masa tidak pernah bisa dilepaskan dari peran politik yang dimainkan oleh umat Islam, dalam sejarahnya umat Islam Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi arah pembangunan politik dan demokrasi. Turut sertanya umat Islam dalam kehidupan politik telah menjadikan panggung politik nasional bergerak cukup dinamis.

Menurut Dr. Zuly Qodir,<sup>1</sup> membicarakan relasi umat Islam dengan politik memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat penduduk Indonesia dari total 237 juta jiwa sebesar 86,7 % mayoritas beragama Islam, maka secara politik dan sosiologis fakta tersebut sangat penting untuk diperhatikan, serta menjadi sesuatu yang relevan sebagai objek kajian. Relasi umat Islam dengan politik merupakan sebuah konsekuensi logis dari diterapkannya sistem demokrasi di republik ini, meskipun sikap umat Islam dalam memandang hubungan Islam dengan politik (demokrasi) tersebut tidak seragam. Umumnya terdapat tiga varian besar pandangan umat Islam mengenai relasi Islam dengan politik.

Mengutip Munawir Sjadzali,<sup>2</sup> ada tiga aliran besar melihat peta hubungan antara Islam dengan politik (demokrasi). *Pertama*, Islam formalis, aliran yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang sempurna (*syamil*) dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. Aliran Islam ini memiliki keyakinan, bahwa Islam memiliki seperangkat sistem politik (*siyasah*) tersendiri yang berbeda dengan demokrasi (barat), dari pemahaman keberagaman tersebut, aliran Islam ini memperjuangkan formalisme agama Islam menjadi dasar dalam bernegara. *Kedua*, Islam liberal, aliran yang berpandangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak memiliki seperangkat konsep kenegaraan, Islam ditempatkan sebatas agama yang hanya mengatur aspek spiritual setiap penganutnya, aliran ini menyakini bahwa Islam tidak boleh ikut campur tangan mengurus masalah kenegaraan. Aliran ini menolak formalisme Islam ke dalam kehidupan kenegaraan. *Ketiga*, Islam subtansi, aliran yang menolak pandangan Islam agama serba lengkap, juga menolak Islam tidak memiliki nilai etik politik kenegaraan, aliran terakhir ini menjadi sintesis dari kedua aliran sebelumnya, mereka yang menganut aliran ketiga ini memiliki pandangan bahwa Islam menyediakan pandangan-pandangan etis bagi pengaturan masyarakat dan negara, tetapi yang menarik aliran ini menolak formalisme Islam, cukup nilai-nilai subtansi Islam tentang keadilan, kesejahteraan dan demokrasi menjadi prioritas utama dalam bernegara.

Masa Orde Lama Masyumi dan NU menjadi dua partai terdepan yang memperjuangkan formalisme syariah dengan menghendaki dasar negara berdasarkan Islam bukan Pancasila.

---

<sup>1</sup>Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012) Hal 151.

<sup>2</sup>Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi : Pemikiran Nurcholiah Madjid*. (Jakarta : Penerbit Republika, 2004) Hal 73.

Dengan tegas Mohammad Natsir salah tokoh Masyumi,<sup>3</sup> menegaskan Pancasila tidak patut dijadikan ideologi negara, karena sila-sila itu bersifat relatif, baik sila-sila itu sendiri maupun hubungan satu dengan lainnya. Berbeda dengan Islam yang mempunyai hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui wahyu, yang memiliki ukuran mutlak untuk mengatur persoalan-persoalan manusia. Sikap kritis Natsir terhadap ideologi Pancasila dalam sidang-sidang Konstituante ini menurut Adhes Satria,<sup>4</sup> menempatkan sosoknya sebagai salah satu tokoh penting kalangan Islam formalis yang memperjuangkan dasar negara Islam di Indonesia. Keberadaan M. Natsir dan Masyumi masa orde lama telah membawa nuansa baru bagi arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam mengartikulasi kepentingan agama, politik, ekonomi dan budayanya.

Pertarungan tajam antara kubu Islam dan nasionalis (Pancasila) di Konstituante tidak memperoleh titik temu, kedua pihak mengalami jalan buntu dalam mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Setiap kali *voting* dilakukan antara pihak yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dengan kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, suara mayoritas yang diperlukan untuk mencapai konsensus politik tidak tercapai. Bahkan hal tersebut terjadi berlarut-larut, ditambah kemudian dengan banyaknya anggota Konstituante yang tidak bersedia lagi menghadiri rapat. Agar dapat keluar dari persoalan politik yang sangat pelik, atas pertimbangan stabilitas politik serta keamanan nasional, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan lembaga Konstituante dan menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup>

Masa Orde Baru berkuasa kalangan Islam politik selain mengalami marginalisasi peran politik, juga menghadapi represifitas kekerasan oleh negara, untuk memahamai relasi umat Islam dengan Orde Baru, dalam studinya Aay Muhamad Furkon,<sup>6</sup> membagai periodeisasi hubungan pemerintah dengan umat Islam.

*Pertama*, periode 1968-1990 adalah masa ketertindasan, hal ini bermula dari ditolaknya rehabilitasi Masyumi, kemudian diikuti dengan kecurigaan yang tinggi terhadap umat Islam. Karena itu, dalam periode ini, berbagai peristiwa terjadi yang menjadikan umat Islam sebagai sasaran kekerasan oleh negara. Kasus pertama, tragedi berdarah di Tanjung Priok. Kasus kedua, pelarangan jilbab, sekitar tahun 1980, semangat pemakaian jilbab yang dilakukan siswi-siswi di beberapa sekolah menengah semakin tumbuh, kesadaran memakai kain penutup kepala ini, dipengaruhi oleh Revolusi Islam Iran 1979, dimana berita-berita revolusi menjadi *headline* media-media nasional, photo-photo kerumunan demontran yang menggunakan jilbab, sebagai simbol perlawanan terhadap budaya barat yang hedonis menjadi inspirasi para remaja Islam di Indonesia.<sup>7</sup> Tetapi keinginan para remaja Islam ini tidak berbanding lurus dengan keputusan pemerintah Orde Baru, yang melarang pemakaian jilbab di lingkungan sekolah-sekolah negeri, karena jilbab dianggap bukan standar seragam yang telah diputuskan berdasar SK 052/C/Kep/D.82, sebuah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen. Dikdasmen) yang ketika itu dijabat oleh Prof. Darji Darmodiharjo, SH yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1982. Sebelumnya, seragam sekolah ditentukan oleh Kepala Sekolah atau Kepala Kantor Wilayah yang berwenang, secara resmi tujuan utama SK itu adalah menumbuhkan rasa persatuan dan

---

<sup>3</sup>Andy Sulistiyanto, *Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Lelah*, dalam *Edisi Khusus 100 Tahun Mohammad Natsir*, Majalah Islam Sabili.

<sup>4</sup>Adhes Satria, *PRRI, Masyumi Yang Terbelah*, dalam *Edisi Khusus 100 Tahun Mohammad Natsir*, Majalah Islam Sabili.

<sup>5</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).Hal 26.

<sup>6</sup>Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*. (Jakarta : Terajau, 2004) Hal 116

<sup>7</sup>*Ibid* Hal 119-120.

kesatuan.<sup>8</sup> Cukup menakjubkan, semakin dilarang pemakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri, semakin tumbuh perlawanan yang dilakukan oleh siswi-siswi berjilbab, tidak sedikit diantara mereka mengalami penindasan dan diskriminasi oleh pihak sekolah, pilihan untuk pindah sekolah ke sekolah-sekolah Islam (Muhammadiyah) menjadi pilihan terakhir bagi mereka. Kasus ketiga, tragedi berdarah Lampung, peristiwa itu dalam versi pemerintah dikenal dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Warsidi, peristiwa berdarah 6 Febuari 1989 berawal dari terjadinya *disharmoni* hubungan antara komunitas Cihideung sebagai jamaah Warsidi dengan pihak Koramil Way Jepara, upaya damai dilakukan oleh kedua pihak, namun bentrokan fisik dari kedua pihak akhirnya tidak dapat dihindari, aparat keamanan dengan senjata lengkap, memporakporandakan perkampungan jamaah Warsidi, hingga banyak anak-anak dan ibu-ibu meninggal. Jumlah korban hingga saat ini masih belum jelas, pihak pemerintah orde baru menyebut 9 orang, pihak LSM menyebutkan sekitar 246 orang. Dalam penelitian kasus ini, Al-Chaidar mengatakan adanya keterlibatan para intelejen dalam merekayasa kasus ini, konflik politik ini dilakukan sebagai konspirasi untuk membuat pencitraan tumbuhnya Islam radikal, dengan harapan mampu mengembosi suara partai Islam dalam setiap pemilu.<sup>9</sup> Jika melihat kondisi diatas hampir bisa dipastikan semua ruang gerak Islam politik (formalis) tertutup sudah, belum lagi kebijakan pemerintah untuk memaksakan *fusi* partai-partai Islam melebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan mewajibkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.

*Kedua*, periode era 1990-an kebijakan pemerintah orde baru terhadap umat Islam sedikit demi sedikit berubah, membuka komunikasi dengan kalangan Islam, bahkan melalui Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Presiden Soeharto membangun ratusan masjid dan mensponsori pengiriman dai ke daerah terpencil. Kemudian di tahun 1991, Soeharto meresmikan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), serta pada tahun yang sama membuka Festival Istiqlal, dalam festival itu serangkaian budaya Islam nasional dan internasional dipertontonkan sebagai simbol penghargaan terhadap budaya Islam. Tidak hanya itu awal dekade 1990-an pemerintah orde baru membolehkan para siswi di sekolah umum untuk mengenakan jilbab, bahkan Soeharto kemudian menempuh langkah politik cukup mengagetkan dengan merestui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sebuah gerbong yang menghimpun para intelektual muslim Indonesia.<sup>10</sup>

Merespon kebijakan orde baru yang represif terhadap Islam periode pertama, kalangan Islam politik mengalami polarisasi mensikapinya, sebagian kecil melakukan konfrontasi terhadap orde baru, sementara sebagian besar lain, mengambil langkah adaptasi serta responsif, dengan menafsirkan teologi Islam selaras dengan kebijakan modernisasi orde baru.

Kalangan responsif ini dimotori Nurcholis Madjid, melalui proyek pembaharuan Islamnya, Nurcholis menginginkan wajah Islam formalis-ketika itu tidak dikehendaki orde baru- menjadi Islam yang dinamis, berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dunia yang modern, sehingga apresiasi yang diberikan Islam ialah apresiasi ilmiah, bukan ideologis formalis. Menurut Nurcholis, apresiasi ideologis sangat berbahaya, karena bersifat tertutup, berbeda dengan apresiasi modern yang terbuka. Bahkan lebih jauh, Nurcholis berpandangan bahwa “Negara Islam” yang selama ini dicita-citakan Islam formalis, merupakan sebuah gejala *apologetis* umat Islam yang terbelakang terhadap kemajuan dunia barat. Konsep bernegara menurutnya, harus dapat dibedakan di mana wilayah yang menjadi proporsi negara dan mana yang merupakan wilayah agama, bagi Nurcholis negara tidak mungkin menempuh dimensi spiritual guna mengurus, mengintervensi dan mengawasi sikap

---

<sup>8</sup>Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab : Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991*. (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001) Hal 31-32.

<sup>9</sup> Aay Muhamad Furkon, *Ibid* Hal 120.

<sup>10</sup> *Ibid* Hal 122.

batin warga negaranya, karena itu tidak mungkin Indonesia memilih Islam sebagai bentuk fondasi konstitusi bernegara.<sup>11</sup>

Agama Islam yang dipahami oleh Nurcholis Madjid,<sup>12</sup> ditempatkan pada tingkat yang lebih abstrak sebagai nilai-nilai etis, yang berfungsi memberikan arah serta orientasi kepada umatnya, Islam tidak dipahami sebagai agama bersifat *legal-formalistik*, yang melahirkan formalisme susunan dan struktur politik kenegaraan. Islam harus melahirkan jiwa demokratis yang menghargai prinsip-prinsip *prulalisme* yang selaras dengan arus modernisasi, Nurcholis menawarkan solusi dalam konteks Indonesia yang sedang mengalami proses modernisasi, yaitu menerima modernitas sebagai *sunatullah* (keniscayaan) dengan mengakarkan diri pada tradisi Islam : memelihara yang lama, yang baik dan mengambil yang baru, yang lebih baik.

Pembaharuan Islam yang digelorkan Nurcholis Madjid, yang lebih banyak mengutamakan pendekatan *inklusivitis*, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, ternyata dapat melestarikan komunikasi dengan golongan lain khususnya dengan pemerintah. Menurut Rusli Karim,<sup>13</sup> gagasan modernisme Islam Nurcholis Madjid, telah banyak membantu melicinkan interaksi umat Islam dengan negara, serta mengeliminasi tuduhan umat Islam tertutup, yang hanya bertujuan mendirikan negara Islam. Perkembangan selanjutnya pembaharuan Islam Nurcholis Madjid, yang mewakili aliran Islam subtansi kemudian menjadi arus utama (*mainstream*) relasi antara Islam politik dengan orde baru, khususnya periode di awal tahun 1990-an. Terbukti Presiden Soeharto banyak mengakomodasi aspirasi umat Islam, sikap akomodatifnya Soeharto terhadap kalangan Islam, menurut Bahtiar Effendy,<sup>14</sup> merupakan sebuah proses evolusi sosiologis politik umat Islam. Setidaknya terdapat dua alasan menjelaskan perubahan relasi politik antara umat Islam dengan pemerintahan orde baru. *Pertama*, selama dua puluh lima tahun, komunitas Islam mengalami proses mobilisasi sosial-ekonomi dan politik, sebagian besar karena akibat pembangunan ekonomi serta meluasnya akses pendidikan tinggi modern, mereka telah *metransformasi* diri ke dalam entitas kelas menengah, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. *Kedua*, faktor penentu negara mengambil langkah-langkah akomodatif, adanya perubahan pemikiran serta tingkah laku politik generasi baru Islam, yang telah mengalami pergeseran proses intelektualisme dan aktivisme dari *legas-formalistik* menjadi lebih *subtansialistik*. Sedangkan bagi William Liddle,<sup>15</sup> hubungan dekat Islam dengan negara di era 1990-an, menunjukkan peralihan basis politik pendukung orde baru, setelah retaknya hubungan antara Soeharto dengan militer, Presiden kedua itu mencari pendukung baru, umat Islam yang kemudian didekati untuk dijadikan sebagai aktor kolaborasi yang akan penyokong rezim.

Kekuasaan orde baru mampu bertahan selama tiga dekade, tahun 1998 orde baru tumbang oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa, salah satu kebijakan pemerintah pasca Soeharto dalam melakukan penataan perangkat keras, yaitu dengan menata kembali sistem kepartaian di Indonesia. Pemerintah transisi di bawah Presiden BJ. Habibie membebaskan pendirian partai politik, selain tiga partai politik warisan Orde Baru : Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Maka otomatis sejak tahun 1999 sampai sekarang Indonesia menganut sistem multi partai, dengan tingkat polarisasi ideologi sangat tinggi. Selain bermunculan partai politik nasionalis, umat Islam pun tidak ketinggalan berpartisipasi dengan mendirikan

---

<sup>11</sup> Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid : Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta : Penerbit Kompas, 2010) Hal 199-123.

<sup>12</sup> Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999).Hal 180.

<sup>13</sup> Rusli Karim, *HMI MPO Dalam Kemelut Politik Di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997) Hal 115.

<sup>14</sup> Aay Muhamad Furkon, *Ibid* Hal 123.

<sup>15</sup> *Ibid* Hal 122.

partai Islam, baik terang-terangan menggunakan ideologi Islam atau konstituennya berbasis massa umat Islam.

Dengan banyak berdirinya partai politik Islam di era reformasi, menjadikan panggung politik Indonesia semakin dinamis, pembicaraan relasi Islam-negara akan semakin menarik, terlebih iklim kebebasan politik era reformasi, memberi peluang seluas-luasnya kembalinya aspirasi Islam politik dalam menerapkan Islam sebagai dasar negara. Dari sinilah aliran Islam formalis menemukan kembali momentum eksistensinya, yang selama tiga puluh tahun orde baru berkuasa peran politik mereka termarginalkan, karena ketika itu, Presiden Soeharto lebih merangkul kalangan Islam yang moderat dan akomodatif terhadap kebijakan politik pembangunannya.

Reformasi telah memberikan kesempatan selebar-lebarnya setiap keyakinan serta ideologi politik untuk berlomba-lomba mengisi ruang-ruang publik, selanjutnya dikontestasikan secara legal dan damai melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali. Tentunya pergulatan ideologi tidak hanya terjadi antara kutub agamis dengan nasionalis, bahkan mungkin sesama kalangan agamis terjadi pergulatan bersifat ideologis dan pragmatis, antara kalangan formalis dan subtansi, saling mengkalim penafsiran politiknya paling sesuai dengan ajaran Islam. Dengan munculnya pergulatan ini tentunya menjadi suatu fenomena yang menarik untuk di teliti lebih lanjut, selain akan memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu politik, akan memberikan pengetahuan kepada kita, mengenai perkembangan politik kalangan Islam pasca pergumulan politik masa orde lama dan orde baru.

Penelitian ini dimaksudkan melihat dinamisasi Islam politik era reformasi, apakah bertahan memperjuangkan aspirasi politik bersifat formalis, atau mengalami pergeseran orientasi nilai ideologis ke Islam subtansi, yang ketika masa akhir orde baru aliran Islam ini mengalami masa keemasan, dengan diakomodasinya beberapa aspirasi umat Islam. Untuk mempersempit objek penelitian, penulis membatasi pergumulan ideologi Islam politik hanya kepada beberapa partai Islam dan berbasis massa Islam : Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan rentang periode masa reformasi dari tahun 1999 sampai 20014

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, ada dua pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini :

1. Bagaimana perkembangan Islam politik di era reformasi?
2. Bagaimanakah bentuk relasi (formalis atau subtansi) Islam politik dengan negara di era reformasi?

### **Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan perkembangan Islam politik di era reformasi?
2. Mengetahui bentuk relasi Islam politik dengan negara mengarah ke aspirasi bersifat formalis ataukah ke subtansi.

### **Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat akademis, penelitian tentang Islam politik diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori relasi Islam politik dengan negara di negara dunia ketiga, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena umumnya ilmuwan politik barat, memandang Islam tidak selaras dengan ide-ide demokrasi.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi partai-partai Islam dalam memformulasikan ideologi, serta merumuskan isu-isu strategis yang sesuai konteks kekinian.

## **Metodelogi Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi. Tujuan penelitian ialah membuat penjabaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu, penelitian ini menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data yang di dapat.<sup>16</sup>

### **2. Jenis Data.**

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian<sup>17</sup>, penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Seperti buku, koran, artikel dan jurnal.<sup>18</sup>

### **3. Teknik Pengolahan Data.**

Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. *Pertama*, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku-buku, catatan, manuskrip dan dokumen-dokumen yang ada serta melakukan wawancara. *Kedua*, menguji dan menganalisa data secara kritis, dengan kritik ini diharapkan dapat mendapatkan validitas sumber data (sumber sekunder, sumber sejarah dan sumber teoritik) yang digunakan dalam penelitian. *Ketiga*, menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh.

## **KERANGKA TEORI**

Untuk membedah objek studi ini, penulis menggunakan sejumlah teori ilmu politik. Ada beberapa teori yang penulis gunakan sebagai alat analisis, teori-teori tersebut diantaranya : partai politik, partai politik Islam dan relasi Islam politik dengan negara.

Partai politik menurut Miriam Budiardjo,<sup>19</sup> suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan biasanya secara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya.

Dalam studinya Burhanuddin Muhtadi,<sup>20</sup> menjelaskan bahwa partai Islam ialah partai yang secara eksplisit mengklaim Islam sebagai ideologi, atau partai yang memiliki basis dukungan dari organisasi-organisasi Islam.

Islam formalis menghendaki adanya dasar Islam di Indonesia, dalam makna yang lebih tegas Indonesia harus menjadi negara Islam, menurut penganut aliran Islam politik ini, ideologi Pancasila tidak sesuai dengan ajaran kebenaran yang datang dari Tuhan, oleh karena itu harus diubah supaya Indonesia mendapat keberkahan dan manfaat untuk semua manusia. Pancasila adalah buatan manusia, sementara Islam ciptaan Tuhan yang tidak mungkin salah, mempertahankan paham negara Pancasila sama dengan mempertahankan kesyirikan dan kekafiran.<sup>21</sup>

Islam liberal aliran politik ini secara tegas memisahkan antara Islam dengan masalah-masalah kenegaraan, Islam dipahami sebatas mengurus soal ketuhanan, sedang negara

---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987) Hal 63.

<sup>17</sup> Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1996) Hal 45.

<sup>18</sup> Ibid Hal 57.

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) Hal 403-404.

<sup>20</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS : Suara Dan Syariah*. (Jakarta : KPG, 2012) Hal 2-3.

<sup>21</sup> Ibid Hal 9-10.

mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan seperti pendidikan, kebudayaan dan kemiskinan, negara tidak ikut terlibat mengurus soal ibadah atau keimanan seseorang yang menjadi urusan privat individu warga negara.<sup>22</sup>

Islam substansi menganggap negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama, tetapi etika Islam dapat memberikan sumbangan peran-peran kenegaraan, formalisme Islam dalam sebuah negara hanya akan mengkerdikan Islam itu sendiri, sehingga Islam semakin sempit, padahal Islam itu untuk semua, keragaman dalam Islam menunjukkan Islam itu aspiratif, akomodatif dan santun.<sup>23</sup>

## **PARTAI POLITIK ISLAM PASCA REFORMASI**

Ledakan partisipasi pendirian partai Islam ini bersifat sesaat hanya terjadi di pemilu pertama era reformasi di tahun 1999, untuk pemilu berikutnya di tahun 2004, 2009 dan 2014 jumlah partai politik Islam mengalami penurunan secara signifikan, tercatat hanya lima partai Islam yang masih tetap bertahan diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang akan penulis deskripsikan satu persatu di bawah ini

Partai Amanat Nasional merupakan partai berbasis massa Islam yang didirikan oleh Amien Rais (Mantan Ketua PP Muhammadiyah), PAN dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta, yang dihadiri sekitar 15 ribu orang, partai berlogo matahari ini menetapkan basis massanya dari kalangan Islam modernis (Muhammadiyah). Meski berbasiskan umat Islam perkotaan, PAN mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka dengan menggunakan asas Pancasila yang menghargai kemajemukan, pluralisme dan keadilan sosial. Partai ini beranggotakan warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari pemikiran, etnis dan agama.<sup>24</sup>

Menurut Amien Rais, penggunaan asas Pancasila sebagai ideologi PAN, dilandasi oleh tiga alasan. *Pertama*, karena alasan teologi, dalam Islam (Al-Qur'an) menurutnya tidak ada satu ayat ataupun hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan mendirikan negara Islam. *Kedua*, alasan bersifat rasional, yakni tidak ada catatan dalam sejarah nasional yang menceritakan kemenangan partai Islam semenjak berdirinya republik Indonesia, dalam arti memperoleh suara mayoritas ketika kontestasi pemilu, baik pada masa Orde Lama ataupun Orde Baru. *Ketiga*, untuk mengayomi serta melindungi kalangan minoritas yang senantiasa dihinggapi ketakutan ketika umat Islam mendirikan partai Islam.<sup>25</sup> Bagi Amien Rais konsep negara Islam harus ditolak, karena tidak ada perintahnya dalam Al-Qur'an dan Hadist, lebih penting menurutnya negara harus menjalankan etika Islam, yang menegakan keadilan sosial jauh dari eksploitasi satu golongan atas golongan lain, apakah arti negara Islam bersifat formalis, tetapi tidak mampu menghadirkan ruh Islam dalam menjalankan kekuasaannya.<sup>26</sup>

Visi dan misi PAN dibawah kepemimpinan Hatta Rajasa, ingin menjadikan PAN sebagai partai yang profesional, menjadikan setiap program politiknya menjadi solusi dari tiap masalah yang muncul di tengah masyarakat, maka menjelang pemilu 2014, PAN menawarkan program untuk membuka akses setiap masyarakat pada sumber-sumber kemakmuran, untuk mewujudkan itu PAN menawarkan reformasi agraria, yang dipahami bukan sekedar bagi-bagi lahan, tetapi pertama-tama untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kartel penguasa impor pangan. Menurut Hatta Rajasa, petani Indonesia harus

---

<sup>22</sup> Zuly Qodir, *Ibid* Hal 51.

<sup>23</sup> Zuly Qodir, *Ibid* Hal 23.

<sup>24</sup> Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).Hal 97.

<sup>25</sup> Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Orde Baru*. (Jakarta : LP3ES, 2003) Hal 141.

<sup>26</sup> Kholid Novianto dan Al Chaidar, *Era Baru Indonesia : Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djilil, Nur Mahmudi dan Yusril Izha Mahendra*. (Jakarta : Rajawali Press, 1999) Hal 22-23.

berkebun ditanahnya sendiri, keadilan atas tanah harus diwujudkan, dengan menolak kartel asing menguasai pangan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Selain itu PAN membuat program kesehatan, dengan berusaha memperbaiki pelayanan sistem BPJS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BPJS merupakan bentuk dari hadirnya negara dalam melindungi serta mem-*protect* sebagian masyarakat (*the poor*).<sup>27</sup> Dari narasi singkat tentang PAN diatas, terlihat bahwa arah ideologi PAN semakin ketengah, dengan program-program yang ditawarkan kepada publik lebih bernuasa strategis, tidak lagi bersifat ideologis (Islam), terlebih dibawah kepemimpinan Hatta Rajasa, partai yang didirikan Amien Rais ini selalu menjadi bagian dari pemerintahan dari kubu nasionalis (Partai Demokrat).

Kelahiran Partai Keadilan (PK) tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan tanggal 9 Agustus 1998 di Jakarta, menandakan tampilnya para aktifis dakwah ini ke publik, dengan berlambangkan dua bulan sabit berwarna emas dan garis lurus diantara kedua bulan sabit itu, PK meneguhkan jati dirinya sebagai partai yang berasaskan Islam. Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan, dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena bagi PK pandangan moderat merupakan sikap objektif yang selaras dengan tata alam, sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, PK akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyeru kemudahan, selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam.<sup>28</sup>

Asas Islam PK adalah Islam moderat, menciptakan keseimbangan dan keadilan, dengan menumbuhkan sikap pertengahan, karena bagi PK pandangan moderat merupakan sikap objektif yang selaras dengan tata alam, sikap semacam itu merupakan refleksi dari pandangan yang menggambarkan jalan tengah, jauh dari sikap berlebih-lebihan, PK akan senantiasa berada dalam posisi pertengahan dan tetap menyeru kemudahan, selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran dalam Islam.<sup>29</sup>

Pada pemilu 1999 Partai Keadilan di DPR RI hanya mendapatkan tujuh kursi anggota legislatif, tentu hasil ini tidak memenuhi *electoral threshold* sehingga Partai Keadilan tidak berhak menjadi peserta pemilu ditahun 2004. Kecuali bila berganti nama dan lambang partai, akhirnya pada tanggal 20 April 2002 dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai baru yang merupakan kelanjutan dari perjuangan PK.<sup>30</sup>

PKS berasas Islam, dengan tujuan membangun masyarakat madani yang berbasis Islam (*religious based civil society*) yang adil dan sejahtera dalam bingkai NKRI, masyarakat madani merupakan masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, serta bergotong royong menjaga kedaulatan negara.<sup>31</sup> Meski berasas Islam PKS dalam visi, misi maupun di Anggaran Dasarnya tidak menyebutkan akan mendirikan negara Islam, walaupun bagi PKS relasi Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, pendirian negara Islam merupakan persoalan lain, karena menurut Hidayat Nurwahid, kata-kata negara Islam bukan sesuatu yang diutamakan, yang lebih utama menurutnya bagaimana nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan publik, negara yang dikehendaki PKS adalah negara berkeadilan dan berkesejahteraan (*justice and welfare state*).<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Harian Kompas, *Partai Amanat Nasional, Hatta : Buka Akses Sumber Kemakmuran*. (Tanggal 23 Januari 2014).

<sup>28</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. (Bandung : Teraju, 2002) Hal 213-214. Hal 244-245.

<sup>29</sup> *Ibid* Hal 244-245.

<sup>30</sup> Ridho Al Hamdi, *Ibid* Hal 100.

<sup>31</sup> Zuly Qodir, *HTI Dan PKS Menuai Kritik : Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. (Yogyakarta : JKSG, 2013) Hal 149.

<sup>32</sup> Aay Muhamad Furkon, *Ibid* Hal 232-234.

Selain moderat terhadap ide demokrasi, sikap moderat PKS lainnya nampak ditunjukkan dengan adanya anggota PKS dari kalangan non-muslim, bahkan diantaranya menjadi anggota legislatif, tercatat ada sekitar 20-an anggota legislatif (DPRD) non-muslim PKS di daerah pemilihan Papua dan NTT, menurut Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro PKS),<sup>33</sup> alasan PKS memberi ruang keanggotaan non-muslim, karena di daerah dimana jumlah penduduk non-muslimnya mayoritas, PKS sering didatangi masyarakat yang ingin menjadi anggota PKS, meskipun sudah dijelaskan PKS sebagai partai Islam, tetapi mereka tidak keberatan menjadi anggota PKS, mereka masuk menjadi PKS bukan karena agamanya yang memang berbeda, tetapi melihat program-program politik yang ditawarkan PKS yang mereka nilai menjadi solusi masalah yang mereka hadapi. Terlebih kemudian di Munas Ke-2 PKS yang berlangsung dari tanggal 17-20 Juni 2010 partai dakwah ini mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka.

Partai Bulan Bintang dideklarasikan tanggal 17 Juni 1998, meskipun sebenarnya embrio pembentukan partai ini bisa dilacak sejak tahun 1989, ketika beberapa tokoh ormas Islam membentuk BKUI (Badan Koordinasi Umat Islam), sebuah lembaga yang menjadi forum bertemunya tokoh-tokoh Islam dalam membahas berbagai masalah keumatan dan kebangsaan.<sup>34</sup> Terdapat sebelas organisasi Islam (ormas) yang tergabung dalam lembaga BKUI ini, diantaranya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Silaturahmi Ulama Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Tarbiyah Indonesia (Pertis), Al-Irsyad Al-Islamiyah (Al-Irsyad) dan Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI).<sup>35</sup>

Menyongsong pemilu 2014, menurut MS Kaban,<sup>36</sup> apabila PBB ditakdirkan berkuasa, partai ini bertekad akan menjadikan Indonesia sebagai negara kuat yang ditopang kepastian hukum guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah negara kuat tercermin dari kemandirian di bidang ekonomi dan kekuatan militer yang tangguh, sehingga Indonesia disegani serta bermartabat di pentas internasional. Saat ini menurut Kaban, Indonesia sangat bergantung pada impor, bahkan hampir semua kebutuhan masyarakat, termasuk komoditi pangan semuanya merupakan produk dari negara lain, padahal Indonesia memiliki lahan luas yang bisa dioptimalkan untuk produk dan diversifikasi pangan. Sedangkan di sektor keuangan Indonesia disetir asing sehingga kurs rupiah selalu turun-naik yang membuat sektor riil tidak optimal berproduksi, terlebih rezim saat ini, terlalu gampang membirkan ekspor bahan mentah, seharusnya diolah terlebih dahulu sehingga menghasilkan nilai tambah.

Maka untuk mengurai segala permasalahan bangsa, Partai Bulan Bintang menawarkan program terobosan yang bisa menarik keluar bangsa Indonesia dari ketergantungan asing, salah satu programnya membuat kapal induk, pembangunan kapal induk menurut PBB akan menstimulasi perkembangan teknologi dan industri segala bidang di Indonesia. Dari pertumbuhan teknologi dan industri ini diharapkan akan menumbuhkan lapangan pekerjaan, sehingga daya beli masyarakat meningkat, dampaknya dari konsumsi tinggi industri pangan akan berkembang serta mendorong swasembada pangan. Bagi PBB pembangunan kapal

---

<sup>33</sup> Harian Republika, *Ketua Majelis Syuro PKS-Hilmi Aminuddin-Kami Ingin Membangun Kebersamaan Dan Keragaman*. (Tanggal 22 Juni 2010).

<sup>34</sup> Kholid Novianto dan Al Chaidar, *Era Baru Indonesia : Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Djilil, Nur Mahmudi dan Yusril Izha Mahendra*. (Jakarta : Rajawali Press, 1999).Hal 149.

<sup>35</sup> Zainal Abidin Amir, *Ibid* Hal 62.

<sup>36</sup> Harian Kompas, *Partai Bulan Bintang, Ms Kaban : Kita Punya Modal Jadi Negara Kuat*. (Tanggal 28 Januari 2014)

induk akan mengerek semua industri di dalam negeri, terlebih karakter Indonesia sebagai negara maritim akan semakin kuat tercipta di dunia internasional.<sup>37</sup>

PBB memiliki visi untuk menegakan sistem yang kuat, bukan sekedar memperjuangkan seseorang menjadi presiden atau pemimpin negara semata, visi ini semakin jelas dengan digunakannya asas Islam, yang dipandang sebagai agama *rahmatan lil alamin* diyakini memiliki sifat universal, PBB mempergunakan prinsip universal ini sebagai rujukan dalam memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Adapun misi dan tujuan PBB terdiri dari dua hal : (1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, (2) Mengembangkan kehidupan demokrasi dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara tujuan khususnya memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>38</sup>

Partai persatuan pembangunan (PPP) adalah partai politik Islam di Indonesia, partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 di Jakarta, PPP merupakan hasil gabungan (fusi) dari empat partai politik Islam warisan pemerintahan Orde Lama : Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Tarbiyah Indonesia (Perti) dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Awalnya PPP menggunakan asas Islam, tetapi dalam perjalanannya tahun 1984 akibat tekanan politik pemerintah Orde Baru, PPP menanggalkan asas Islamnya menggunakan asas Pancasila, serta mengganti gambar Ka'bah dengan bintang segi lima, salah satu gambar yang terdapat dalam burung Garuda.<sup>39</sup>

Setelah tumbanganya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, PPP kembali menggunakan asas Islam dan lambang Ka'bah melalui Muktamar IV di akhir tahun 1998. Kemudian pada Muktamar V tahun 2003 disebutkan dalam Anggaran Dasar (AD), PPP bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera lahir batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) yang di bawah ridho Allah Subhanahu Wata'ala.

Untuk meningkatkan tingkat elektabilitas partai di Pemilu 2014, Suryadarma Ali Ketua Umum PPP, mengenalkan *tagline* PPP sebagai "Rumah Besar Umat Islam". Tagline ini ditujukan kepada partai-partai Islam yang tidak bisa bertahan di pemilu 1999, 2004 dan 2009, diharapkan pulang kembali ke rumah besar Islam, PPP menawarkan diri sebagai rumah nyaman bagi umat Islam dari beragam mazhab dan aliran. Rumah besar Islam tidak hanya untuk pemeluk agama Islam saja, tetapi juga untuk umat agam lain, PPP ingin mempersembahkan rumah besar ini untuk Indonesia.<sup>40</sup>

Selain mencetuskan Rumah Besar Umat Islam, PPP memperluas basis dukungan dengan menjadikan anak muda Islam sebagai kader inti partai, menurut M. Romahurmuziy (Sekjen PPP), dengan kehadiran anak-anak muda di PPP diharapkan tidak saja memberi warna baru bagi partai, yang selama ini identik dengan figur orang tua dan kaum tradisional. Namun, juga dapat menarik para pemilih pemula di pemilu 2014.<sup>41</sup> Terlebih jika PPP dipercaya rakyat untuk memimpin lima tahun kedepan, PPP akan membuat kebijakan lebih substansi, tidak bersifat sektoral yang mewakili kepentingan sempit. Program utama PPP yaitu tentang kedaulatan (kemandirian) pangan, PPP memiliki keyakinan program kedaulatan pangan akan menyerap banyak tenaga kerja, bahkan menjadi magnet bagi warga Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk kembali ke tanah air.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Zuly Qodir, Sosiologi Politik Islam *Ibid* Hal 246-247.

<sup>39</sup> *Ibid* Hal 227-229.

<sup>40</sup> Harian Kompas, *Partai Persatuan Pembangunan : Suryadarma Ali, Rumah Besar Umat Islam Yang Inklusif*. (Tanggal 24 Januari 2014).

<sup>41</sup> Harian Kompas, *PPP Merangkul Yang Berserak* (Tanggal 24 Januari 2014).

Menjelang pelaksanaan pemilu 2014, PPP berharap memperoleh suara diatas 15%, meskipun di beberapa survei terakhir dari beberapa lembaga survei, tingkat elektabilitas PPP dibawah 10%, tetapi PPP optimis akan mampu meraih target tersebut, salah satu alasannya menurut Romahurmuziy, biasanya suara partai Islam di pemilu selalu lebih tinggi dari perkiraan hasil survei. Ini karena sebagian pemilih menunggu fatwa dari panutannya (ulama atau kiayi), fatwa tersebut biasanya akan keluar di akhir putaran masa kampanye pemilu legislatif.<sup>42</sup> Ternyata perkiraan lembaga survei terbukti, suara PPP di bawah angka 10%, meskipun mengalami kenaikan dari 5% (2009) menjadi 6% di pemilu 2014, tetap saja perolehan suara ini jauh dibawah target yang ditetapkan.

Bulan Mei 1998 menjadi titik peristiwa menentukan bagi kalangan Nahdiyyin, karena banyak usulan dari kader agar NU kembali masuk ke gelanggang politik praktis dengan mendirikan partai politik baru. Melihat kuatnya dorongan dari bawah, maka tanggal 3 Juni 1998, PB NU membentuk Tim Lima yang bertugas mempersiapkan berdirinya partai untuk warga NU, setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 23 Juli 1998 secara resmi berdirilah PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) di kediaman Gus Dur, Ciganjur-Jakarta Selatan.<sup>43</sup>

Secara ideologis PKB tidak menetapkan Islam sebagai asasnya, melainkan menetapkan asas Pancasila, dalam Anggaran Dasarnya di Bab III, pasal 3 dijelaskan bahwa partai berasaskan : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.<sup>44</sup>

Pemakaian Pancasila sebagai asas partai dilandasi oleh cara pandang tokoh-tokoh PKB dalam melihat Islam, mereka menyakini bahwa Islam tidak perlu dituangkan ke dalam bentuk formal-kelembagaan, tetapi paling penting ajaran-ajaran Islam tercermin pada tingkah laku sehari-hari, yang disebut sebagai *akhlakul karimah*. Bagi PKB kadar keislaman suatu partai tidak semata-mata terukur dari pencantuman Islam dalam AD/ART-nya, namun lebih banyak ditentukan seberapa jauh kemampuan partai itu mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan berpolitik, dengan demikian corak keislaman PKB merupakan corak keislaman substansi.<sup>45</sup>

Dari narasi lima partai Islam dan berbasis massa Islam di atas, kita bisa menyimpulkan, bahwa partai-partai Islam saat ini telah meninggalkan ideologi Islamisnya, umumnya sekarang ideologi partai-partai Islam bersifat terbuka atau sangat pragmatis, kesimpulan ini diperkuat pendapat Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari, menurutnya partai Islam di Indonesia saat ini memiliki paham politik yang moderat, bahkan partai Islam yang ada di DPR mendukung penuh empat pilar kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Bahkan di MPR, partai Islam dan nasionalis sangat gigih mendukung gerakan sosialisasi empat pilar negara, atas sikap partai Islam tersebut, partai Golkar yang mewakili kelompok nasionalis memandang masa depan relasi partai Islam dengan negara secara positif dan optimis.<sup>46</sup>

Sikap keterbukaan ideologi partai Islam ini merupakan sesuatu yang realistis, menurut Bima Arya, bahwa partai-partai Islam untuk meningkatkan performa elektoral sangat ditentukan kemampuannya dalam merekonstruksi diri ditengah-tengah realitas psikis bangsa ini. Partai Islam harus mengedepankan agenda-agenda kongkrit langsung bersinggungan dengan kepentingan publik ketimbang mengusung wacana-wacana ideologis seperti formalisme syariat agama, partai Islam tidak punya pilihan lain kecuali bergerak di isu-isu

---

<sup>42</sup> Harian Kompas, *PPP Rumah Yang Masih Sepi* (Tanggal 24 Januari 2014).

<sup>43</sup> Ridho Al-Hamdi, *Ibid* Hal 101.

<sup>44</sup> Zainal Abidin Amir, *Ibid* Hal 114.

<sup>45</sup> *Ibid* Hal 114-115.

<sup>46</sup> Harian Republika, *Parpol Islam Disegani* (Tanggal, 22 Maret 2014).

kongkrit seperti kesejahteraan, penegakan hukum dan anti korupsi. Partai Islam memiliki modal strategis untuk meraih kepercayaan publik, karena memiliki otoritas moral dan legitimasi religius yang tidak dimiliki partai-partai nasionalis.<sup>47</sup>

## **PENUTUP**

Partai-partai Islam ini senantiasa menjadi bagian dari koalisi di dalam pemerintahan, sehingga selama era reformasi relasi Islam politik dengan negara bersifat harmonis dan akomodatif.

Terakhir, selama reformasi ini relasi Islam politik didominasi relasi yang bersifat substansi, ini dibuktikan dengan masuknya seluruh partai-partai Islam ke dalam pemerintahan, masuknya partai-partai Islam ke dalam pemerintahan menandakan wajah Islam politik yang akomodatif dan pragmatis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi : Pemikiran Nurcholiah Madjid*. (Jakarta : Penerbit Republika, 2004).
- Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan : Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*. (Bandung : Teraju, 2002).
- Andy Sulistiyanto, *Mujahid Dakwah Yang Tak Kenal Lelah*, dalam *Edisi Khusus 100 Tahun Mohammad Natsir*, Majalah Islam Sabili.
- Adhes Satria, *PRRI, Masyumi Yang Terbelah*, dalam *Edisi Khusus 100 Tahun Mohammad Natsir*, Majalah Islam Sabili.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)
- Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Kontemporer*. (Jakarta : Terajau, 2004)
- Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti, *Revolusi Jilbab : Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991*. (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2001)
- Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid : Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta : Penerbit Kompas, 2010)
- Bima Arya, *Re-Kontekstualisasi Partai-Partai Islam dalam Bima Arya, Anti Partai* (Depok : Gramata Publishing, 2010)
- Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS : Suara Dan Syariah*. (Jakarta : KPG, 2012).
- Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).
- Rusli Karim, *HMI MPO Dalam Kemelut Politik Di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1997)
- Matori Abdul Djali, *Nur Mahmudi dan Yusril Izha Mahendra*. (Jakarta : Rajawali Press, 1999).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Suharsono, *Metode Penelitian Sosial*. (Yogyakarta : Benteng Budaya, 1996).

---

<sup>47</sup> Bima Arya, *Re-Kontekstualisasi Partai-Partai Islam dalam Bima Arya, Anti Partai* (Depok : Gramata Publishing, 2010) Hal 35.

- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1987)
- Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam : Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012)
- Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Orde Baru*. (Jakarta : LP3ES, 2003)
- Zuly Qodir, *HTI Dan PKS Menuai Kritik : Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. (Yogyakarta : JKSG, 2013)
- Harian Republika, *Ketua Majelis Syuro PKS-Hilmi Aminuddin-Kami Ingin Membangun Kebersamaan Dan Keragaman*. (Tanggal 22 Juni 2010).
- Harian Kompas, *Partai Bulan Bintang, Ms Kaban : Kita Punya Modal Jadi Negara Kuat*. (Tanggal 28 Januari 2014)
- Harian Kompas, *Partai Persatuan Pembangunan : Suryadarma Ali, Rumah Besar Umat Islam Yang Inklusif*. (Tanggal 24 Januari 2014).
- Harian Kompas, *PPP Merangkul Yang Berserak* (Tanggal 24 Januari 2014).
- Harian Kompas, *PPP Rumah Yang Masih Sepi* (Tanggal 24 Januari 2014).
- Harian Republika, *Parpol Islam Disegani* (Tanggal, 22 Maret 2014).